

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DI SENTRA WYATA GUNA KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2022

Fadhil Akmali Zaidan¹, Risna Resnawaty²

^{1&2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

fadhil19003@mail.unpad.ac.id, resnawatyfathoni@gmail.com

ABSTRAK:

Pada penelitian ini membahas tentang program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung sebagai desain program dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan sosial dalam program rehabilitasi sosial tersebut. Penelitian ini melibatkan empat informan terkait program ATENSI untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil dari ke empat dimensi tersebut adalah *Selective, Intangible and Limited, Public, Private, and Free Standing*, serta *fixed amount block grant*. Nilai yang muncul pada pilihan tersebut adalah *Equity, Adequacy, Effectiveness*, serta *Cost-Effectiveness*.

program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan sosial, namun tetap berfokus pada memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bagi penerima manfaat. Penting untuk mempertimbangkan alokasi dana yang optimal dengan prinsip *cost-effectiveness* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ATENSI dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial; Rehabilitasi Sosial; Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

This study discusses the ATENSI program at the Wyata Guna Sentra in Bandung City as a program design from the Minister of Social Affairs Regulation Number 7 of 2022. This research uses a qualitative approach with a descriptive method to provide an in-depth understanding of the implementation of social policies in the social rehabilitation program. This study involved four informants related to the ATENSI program to collect data through in-depth interviews, observation, and literature and documentation studies.

*This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques carried out namely in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that the policy choices taken from the four dimensions are *Selective, Intangible and Limited, Public, Private, and Free Standing*, as well as a *fixed amount block grant*. The values that appear in the options are *Equity, Adequacy, Effectiveness, and Cost-Effectiveness*.*

*the ATENSI program at the Wyata Guna Sentra Kota Bandung faces various challenges in the delivery of social services, but remains focused on providing fast, appropriate and efficient services for beneficiaries. It is important to consider the optimal allocation of funds with the principle of *cost-effectiveness* to increase the effectiveness and efficiency of the ATENSI program in achieving the goal of community welfare.*

Key Words: Social Policy; Social Rehabilitation; The Ned for Social Welfare Services.

PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan fenomena yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berkontribusi pada munculnya masalah sosial yang beragam, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu, kelompok, dan komunitas (Taftazani, 2017). Masalah sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, dan bidang lainnya, yang tak luput dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat (Mawaza & Khalil, 2020).

Dalam upaya menanggulangi permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan langkah-langkah dan kebijakan sosial yang tepat (Desiana & Krisnamurti, 2020). Kebijakan sosial adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk merespon isu-isu publik dan masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan sosial ini adalah untuk memecahkan masalah sosial serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2014).

Salah satu bentuk kebijakan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia adalah Program Asistensi

Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ATENSI adalah program pelayanan sosial yang bertujuan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial atau kecanduan. Melalui program ini, penerima manfaat diberikan berbagai jenis dukungan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan sosial lainnya. Program ATENSI bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kualitas hidup penerima manfaat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Pelaksanaan program ATENSI dilakukan oleh berbagai satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan program ATENSI adalah Sentra Wyata Guna Kota Bandung. Sebelumnya dikenal sebagai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN Wyata Guna), lembaga ini telah mengalami perubahan nomenklatur dan pergeseran penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung. Jika sebelumnya lembaga ini hanya fokus pada pelayanan bagi penyandang disabilitas sensorik netra, kini fokusnya telah diperluas untuk melayani seluruh Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencakup anak, lanjut usia, penyandang disabilitas korban bencana, dan kedaruratan. Perubahan ini merupakan upaya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menciptakan program layanan ATENSI yang bersifat multifungsi dan dapat merespons berbagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak.

Namun, perubahan dalam program ATENSI yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 perlu ditinjau secara mendalam untuk memahami dampak dan efektivitasnya dalam menangani permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang komprehensif untuk menggambarkan dan menganalisis desain program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam analisis ini, akan digunakan kerangka analisis kebijakan sosial yang dikemukakan oleh Gilbert & Terrel (1974)

yang memfokuskan pada empat dimensi utama, yaitu *Basis of Social Allocation* (siapa yang akan menjadi penerima manfaat), *The Nature of Social Provision* (manfaat apa yang akan diberikan), *The Structure of The Delivery System* (bagaimana manfaat tersebut diberikan kepada penerima manfaat), dan *Mode of Finance* (sumber dan sistem pendanaan). Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang implementasi kebijakan dalam program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung serta mengevaluasi efektivitasnya dalam merespon dan memecahkan masalah sosial yang ada.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fedryansyah, 2016) dan (Mardiyanti, 2021) tentang implementasi kebijakan sosial pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan program seringkali menghadapi kendala, baik dari segi pelaksanaan program maupun pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, kajian tentang analisis kebijakan pada penyelenggaraan Program ATENSI ini menjadi penting untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan sosial tersebut dan memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan sosial merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik serta aparatur negara. Tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk merespons isu-isu sosial yang ada di masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara kolektif (Widodo, 2021).

Pengertian kebijakan sosial ini diperkuat oleh beberapa ahli. Menurut Suharto (Suharto, 2009), kebijakan sosial dibuat untuk mengatasi isu-isu publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan memberikan layanan sosial yang sesuai. Marshal (Marshall, 1965) menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan warga negara melalui penyediaan layanan sosial. Sementara itu, (Jefferys & Rein, 1971) berpendapat bahwa kebijakan sosial ditujukan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, meningkatkan pemerataan, mendistribusikan pelayanan, dan memberikan bantuan sosial.

Dalam penerapannya, kebijakan sosial memiliki tiga dimensi, yaitu preventif (mencegah terjadinya masalah sosial), kuratif (mengatasi masalah sosial yang sudah ada), dan promotif (memajukan kesejahteraan masyarakat). Tujuan dari kebijakan sosial adalah mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial,

memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, meningkatkan hubungan sosial, dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat (Spicker, 2008).

Mengacu pada (Dunn, 2018), analisis kebijakan merupakan sebuah metode analisa yang bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan akibat pada suatu kebijakan. Kegiatan analisis kebijakan dapat bersifat formal dan hati hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Analisis kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau assessmen akurat mengenai konsekuensi dari kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (Suharto, 2014).

Dalam kerangka analisis yang dikemukakan oleh Gilbert & Terrel, terdapat empat dimensi penting yang digunakan untuk menganalisis kebijakan sosial secara komprehensif:

1. *The Basis of Social Allocation*

Dimensi ini fokus pada aspek "siapa" yang menjadi penerima manfaat dalam kebijakan sosial. Pemahaman tentang siapa yang memenuhi syarat untuk

menerima manfaat dari layanan yang diberikan sangat penting. Dalam hal ini, dapat dilakukan dua pilihan utama, yaitu *universalisme* dan *selectivity*. *Universalisme* mengartikan bahwa semua anggota masyarakat menjadi penerima manfaat dari kebijakan sosial tanpa memandang kriteria tertentu. Sedangkan pada pilihan *selectivity* penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, misalnya tingkat pendapatan atau kondisi sosial tertentu.

2. *The Nature of Social Provision*

Dimensi ini membahas tentang bentuk pelayanan atau manfaat apa yang akan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria atau syarat penerima manfaat. pilihan dalam menentukan sesuatu yang akan diberikan kepada penerima manfaat tersebut dapat dibedakan antara lain dalam bentuk *intangible and limited* (sesuatu yang tidak terlihat dan terbatas) atau *concrete and diversified* (sesuatu yang bersifat konkrit dan beragam).

3. *The Structure of Delivery System*

Setelah menentukan penerima manfaat dan jenis manfaat yang akan diberikan, dimensi ini membahas tentang bagaimana pelaksana kebijakan menyampaikan

layanan kepada penerima manfaat. Dalam pilihan *public and income maintenance linked*, penyampaian pelayanan terpusat pada lembaga pemerintah atau lembaga yang terkait dengan pendapatan. Pada pilihan *public, private, and free-standing*, penyampaian pelayanan melibatkan peran sektor swasta dan berdiri sendiri dari lembaga pemerintah.

4. *The Mode of Finance*

Dimensi ini menyangkut sumber dan tipe pendanaan untuk kebijakan sosial. Pertimbangan mengenai dana yang digunakan adalah penting karena kebijakan sosial biasanya dianggap sebagai mekanisme non-profit. Sumber pendanaan terbagi menjadi dua pilihan antara lain *open-ended categorical grant* (hibah terbuka) yaitu berasal dari pemerintah dan swasta atau *fixed-amount block grant* (jumlah dana hibah yang tetap) yang berasal dari pemerintah.

Selain empat dimensi tersebut, Gilbert & Terrel juga menekankan bahwa nilai-nilai seperti *equality*, *equity*, dan *adequacy* mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan sosial. Kriteria-kriteria seperti *efficiency*, *effectiveness*, *cost-effectiveness*, dan *cost-benefit* juga

sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang keempat dimensi dan nilai-nilai yang terkait dapat membantu para pengambil keputusan untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan sosial yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menangani masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan individu yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami gangguan sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah:

1. Kuratif

Memberikan layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus, seperti gangguan koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psiko sosial, atau pendidikan.

2. Rehabilitatif

Memberikan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan kemampuan individu yang mengalami gangguan, sehingga mereka dapat berfungsi secara wajar.

3. Promotif

Memberikan layanan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan individu yang sudah ada, dengan tujuan mencapai kesejahteraan optimal.

4. Preventif

Memberikan layanan pencegahan agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah atau lebih berat bagi individu yang membutuhkan layanan khusus (Sumantri et al., 2018)

Pelayanan rehabilitasi sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui panti atau diasrama. Panti atau asrama ditujukan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus karena kondisi sosial dan ekonominya yang kurang mendukung, atau keluarga tidak mampu memberikan pelayanan. Melalui panti atau asrama, individu yang membutuhkan dapat mendapatkan pengasuhan, pelatihan vokasional, bimbingan spiritual, konseling psikososial, dan pelayanan aksesibilitas bantuan sosial (Adi & Satifa, 2020). Terdapat juga beberapa model pelayanan

rehabilitasi sosial lainnya, seperti *Institutional Based Rehabilitation (IBR)*, *Extra-institutional Based Rehabilitation*, dan *Community Based Rehabilitation (CBR)* (Farhan, 2020).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran, kondisi, dan realitas mengenai penyelenggaraan program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung. Sampel dipilih secara *purposive* dan terdiri dari empat informan yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk peneliti sebagai cara peneliti untuk dapat mengakses data penelitian baik secara primer maupun sekunder, guna memberikan penjelasan secara komprehensif di bidang penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi wawancara mendalam, observasi, serta

studi literatur dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penyelenggaraan program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung sebagai sebuah bentuk implementasi program dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022. Data yang dikumpulkan dan dianalisis akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang penyelenggaraan kebijakan sosial dalam program rehabilitasi sosial tersebut menggunakan kerangka analisis Gilbert & Terrek yang berfokus pada empat dimensi kebijakan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penyelenggaraan Program ATENSI di Sentra Wyata Guna kota bandung menunjukkan bahwa pilihan yang diambil dalam menentukan *Basis of Social Allocation* adalah *selective*, dengan adanya kriteria dan syarat tertentu untuk menjadi penerima manfaat. Perubahan bentuk lembaga mengakibatkan pergeseran penerima manfaat menjadi multilayanan, dan meningkatkan jumlah penerima manfaat, namun bertolak belakang dengan terbatasnya fasilitas yang ada pada lembaga

menyebabkan penantian dan pelayanan yang sementara. Pilihan dalam menentukan siapa yang menjadi sasaran manfaat pada kebijakan program ATENSI ini dipengaruhi oleh nilai *Equity*, yaitu prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat di masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam pilihan *selective* yang diambil, di mana bantuan dan pelayanan diberikan secara selektif berdasarkan kondisi dan hambatan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat. Pelayanan respon kasus yang diimplementasikan oleh lembaga juga menunjukkan upaya untuk membuat layanan ATENSI dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa terbatas oleh fasilitas di dalam lembaga. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya sosial, di mana bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkannya secara lebih mendesak.

Pada dimensi *The Nature of Social Provision* menggambarkan bahwa dalam program ATENSI yang dijalankan, manfaat yang diberikan terdiri dari dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial/pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, dan mental spiritual), pelatihan vokasional, bantuan asistensi sosial dan dukungan aksesibilitas. Jenis manfaat dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan terapi termasuk dalam kategori *intangible and limited*, dengan manfaat

berupa kesempatan untuk hidup layak, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan bimbingan mental dan spiritual. Sementara itu, jenis manfaat bantuan asistensi sosial dan dukungan aksesibilitas termasuk dalam kategori *concrete and diversified*, dengan manfaat berupa barang seperti laptop, handphone, dan peralatan pijat. Dalam menentukan jenis manfaat, nilai yang mempengaruhi adalah nilai *adequacy*, yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar individu dan memastikan manfaat yang diberikan mencukupi. Beragamnya manfaat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat agar mereka dapat memanfaatkannya dengan maksimal dan meningkatkan kesejahteraan.

Meskipun bantuan kemandirian disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, terdapat kendala dalam penentuan sasaran yang tepat karena kurangnya pemahaman pada pejabat fungsional yang melakukan asesmen. Kurangnya jumlah pekerja sosial yang mendampingi penerima manfaat juga menjadi masalah, menyebabkan beberapa penerima manfaat keluar dari lingkungan lembaga tanpa pengawasan dan beberapa kategori penerima manfaat mendapatkan perhatian yang kurang dan pelayanan yang kurang tepat.

Pada dimensi *The Structure of Delivery System* menunjukkan bahwa Sentra Wyata Guna mengambil pilihan *public, private, and free standing* dalam menyampaikan layanan program ATENSI. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa lembaga ini bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pihak swasta, untuk memberikan layanan kepada penerima manfaat. Hal ini memungkinkan lembaga untuk mengatasi kekurangan seperti kurangnya SDM pekerja sosial dan sarana/prasarana. Meskipun ada perubahan bentuk lembaga, pilihan *public, private, and free standing* dalam penyampaian layanan tetap berlaku dengan beragamnya kategori penerima manfaat saat ini. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memberikan layanan yang maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai karakteristik penerima manfaat. Kriteria utama dalam menentukan cara penyampaian layanan adalah *effectiveness*, yang menekankan pentingnya mencapai hasil yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan sosial. Dengan melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan, lembaga dapat meningkatkan efektivitas penyampaian layanan program ATENSI. Kerja sama dengan pihak eksternal memungkinkan lembaga untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan fasilitas yang lebih luas untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif bagi penerima manfaat.

Pada dimensi *Mode of Finance* menunjukkan bahwa Sentra Wyata Guna mengambil pilihan *fixed-amount block grant* guna membiayai penyelenggaraan program ATENSI dengan memperoleh sumber pendanaan tetap dari APBN yang memberikan keuntungan bagi Sentra Wyata Guna karena memiliki sumber pendanaan yang tetap setiap tahun. Dengan pendanaan yang stabil, lembaga dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta optimalisasi pelayanan program ATENSI untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Namun, alokasi dana yang tetap ini menjadi tantangan dalam menghadapi kebutuhan layanan yang beragam dan layanan respon kasus yang tidak dapat diprediksi. Keberagaman sasaran penerima manfaat dan layanan respon kasus yang tidak dapat diprediksi menimbulkan kekhawatiran bahwa alokasi dana dari APBN mungkin kurang memadai. Prinsip *Cost-Effectiveness* menjadi kriteria penting dalam pemilihan sumber pendanaan ini. Prinsip ini menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas (dana APBN) untuk mencapai hasil yang maksimal dalam program sosial.

KESIMPULAN

Hasil temuan dan analisis pada penyelenggaraan program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung sebagai

sebuah program desain dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 mengindikasikan pilihan-pilihan berikut dalam setiap dimensi yang diteliti menggunakan konsep kerangka analisis kebijakan sosial Gilbert & Terrel:

1. Dimensi *Basis of Social Allocation* pilihan yang muncul adalah *selective*, dengan penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria dan syarat tertentu untuk menerapkan nilai-nilai keadilan *Equity* dalam penyelenggaraan layanan sosial.
2. Dimensi *The Nature of Social Provision* pilihan yang muncul adalah *Intangible and Limited* pada tahapan intervensi dan *Concrete and Diversified* pada tahapan terminasi. Manfaat yang diberikan beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, dengan perhatian pada nilai *adequacy* untuk memastikan manfaat yang memadai. Namun, ada tantangan dalam ketidaksesuaian manfaat karena kurangnya pemahaman dan informasi dari pejabat fungsional di lembaga dan jumlah Pekerja Sosial yang belum memadai.
3. Dimensi *The Structure of Delivery System Provision* pilihan yang muncul adalah *Public, Private, and Free Standing*, dengan lembaga

bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyampaikan berbagai jenis manfaat dalam program ATENSI, meningkatkan efektivitas layanan.

4. Dimensi *Mode of Finance* pilihan yang muncul adalah *fixed-amount block grant*, dengan sumber pendanaan dari APBN. Tetapi, kebutuhan layanan yang beragam dan respon kasus yang tidak dapat diprediksi menyebabkan alokasi dana menjadi kurang memadai. Penting untuk mempertimbangkan alokasi dana yang optimal dengan prinsip *cost-effectiveness* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program ATENSI.

Dengan demikian, program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan sosial, namun upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada penerima manfaat tetap menjadi fokus utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R., & Satifa, R. (2020). Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (Abh) Di Brsampk Rumbai. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(2), 131–143.
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.261>
- Desiana, C., & Krisnamurti, H. (2020). Perubahan Fungsi Sosial Asrama Panti Wyata Guna Menurut Peraturan Menteri Sosial No.18 Tahun 2018 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1–8.
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.79>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis an integrated approach* (6th ed., Vol. 21, Issue 1). Routledge.
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Farhan, D. (2020). Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Al-Fajar Berseri Di bekasi. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54739>
- Fedryansyah, M. (2016). KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN. *Share : Social Work Journal*, 12.
- Gilbert, N., & Terrell, P. (1974). Dimensions of Social Welfare Policy. In *British Library Cataloguing-in-Publication Data*. Pearson Eductaion Limited.
- Jefferys, M., & Rein, M. (1971). Social Policy: Issues of Choice and Change. In *The British Journal of Sociology* (2nd ed., Vol. 22, Issue 2). M.E. Sharpe.
<https://doi.org/10.2307/588218>
- Mardiyanti, R. (2021). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Marshall, T. H. (1965). *Social Policy Hutchinson university library: Politics*. Hutchinson.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik

- di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Spicker, P. (2008). Social Policy: Themes and Approaches. In *Health & Social Care in the Community* (2nd ed., Vol. 18, Issue 1). Policy Press. https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2009.00898_2.x
- Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. In *PT Refika Aditama* (Vol. 3). PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Sumantri, I., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7622>
- Taftazani, B. M. (2017). Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822>
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In *Malang: Bayu Media*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).